

Sosialisme dalam Perspektif Ekonomi antara Kebaikan, Kelemahan, dan Penolakan terhadap Hak Individu

Tiara Eka Putri

Program Studi Ekonomi Syari'ah, Fakultas Agama Islam

Universitas Islam Darul 'Ulum Lamongan

tiaraeka.2022@mhs.unisda.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini membahas sistem ekonomi sosialis sebagai respons terhadap ketimpangan yang ditimbulkan oleh kapitalisme, dengan menyoroti keunggulan, kelemahan, serta kritik utamanya. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui studi kepustakaan, mengkaji literatur ilmiah, buku, jurnal nasional, dan dokumen resmi terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa sosialisme menawarkan pemerataan distribusi kekayaan, jaminan sosial, stabilitas ekonomi, serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Negara berperan sentral dalam penyediaan layanan publik dan penciptaan lapangan kerja, sehingga meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun, sistem ini juga menghadapi tantangan, seperti lemahnya insentif inovasi, potensi dominasi negara yang membatasi hak individu, serta risiko inefisiensi ekonomi. Kritik terhadap sosialisme terutama berkaitan dengan pembatasan kebebasan pribadi dan kemungkinan munculnya otoritarianisme. Studi ini menegaskan bahwa sosialisme tetap relevan sebagai alternatif kebijakan ekonomi yang menekankan keadilan dan kesejahteraan kolektif, meskipun implementasinya memerlukan adaptasi terhadap dinamika masyarakat modern.

Kata kunci: Sosialisme, sistem ekonomi, keadilan sosial, hak individu, studi kepustakaan, kualitatif deskriptif.

PENDAHULUAN

Sosialisme muncul sebagai respons terhadap ketimpangan yang diakibatkan oleh sistem kapitalisme, terutama selama Revolusi Industri (Amri, 2019). Di saat segelintir orang meraih keuntungan besar melalui kepemilikan alat produksi, mayoritas pekerja justru terjatuh dalam eksploitasi dan ketidakadilan sosial yang mendalam (Dr. Aang Ridwan, 2019). Dalam konteks inilah sosialisme menawarkan alternatif, yaitu tatanan ekonomi yang mementingkan pemerataan kesejahteraan dan menghapus kepemilikan pribadi atas alat produksi demi kepentingan Bersama (Nasrul et al., 2024).

Membahas sosialisme dari sudut pandang ekonomi sangatlah penting. Sebab, sistem ini tidak sekadar berbicara tentang teori politik, tetapi juga menyentuh aspek-aspek praktis, seperti pengalokasian sumber daya, proses produksi, dan distribusi hasil ekonomi dalam masyarakat. Sosialisme berperan signifikan dalam pembentukan kebijakan publik, khususnya yang terkait dengan jaminan sosial, kepemilikan negara atas sektor-sektor strategis, dan pengelolaan ekonomi secara kolektif.

Dalam perjalanan sejarahnya, sosialisme tidak muncul dalam satu bentuk yang seragam. Berbagai aliran dan pendekatan telah berkembang, mulai dari sosialisme utopis dan sosialisme ilmiah yang dipelopori oleh Karl Marx, hingga varian yang lebih moderat seperti sosial demokrasi di Eropa

Barat. Setiap aliran ini menawarkan perspektif yang berbeda dalam mengatasi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi. Namun, terdapat benang merah yang menyatukan seluruh varian sosialisme, yaitu semangat untuk menciptakan tatanan ekonomi yang lebih adil, yang mengutamakan kepentingan kolektif di atas akumulasi kekayaan pribadi.

Di tengah tantangan global yang kita hadapi saat ini seperti krisis iklim, meningkatnya ketimpangan pendapatan, dan disrupsi yang diakibatkan oleh kemajuan teknologi ide-ide sosialisme kembali mendapatkan sorotan, terutama di kalangan generasi muda dan kelompok progresif. Banyak yang mulai mempertanyakan keadilan dari sistem ekonomi pasar bebas, yang sering kali mengedepankan efisiensi dan profit tanpa memperhatikan aspek kemanusiaan dan keberlanjutan (Adler, 2022). Oleh karena itu, memahami sistem ekonomi sosialis dengan lebih mendalam menjadi langkah penting dalam mengevaluasi alternatif kebijakan serta model ekonomi yang lebih inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan Bersama.

Artikel ini bertujuan untuk secara objektif mengkaji sistem ekonomi sosialis, dengan mengeksplorasi kelebihan-kelebihan yang ada, serta kelemahan-kelemahan yang melekat di dalamnya, termasuk kritik yang sering muncul, terutama terkait dengan pembatasan hak individu (Sholahudin, 2001). Dengan analisis ini, diharapkan pembaca memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang sosialisme dalam konteks ekonomi modern.

KAJIAN PUSTAKA

Sosialisme sebagai sistem ekonomi telah menjadi alternatif dari kapitalisme yang dinilai eksploitatif dan menimbulkan ketimpangan sosial. Dalam literatur, sosialisme dipahami sebagai sistem yang menekankan kepemilikan kolektif atas alat produksi serta distribusi hasil ekonomi yang adil bagi seluruh masyarakat (Wikandaru & Cahyo, 2016). Perbedaan sosialisme dan kapitalisme terletak pada kepemilikan pribadi dan insentif individu. Sosialisme menolak kepemilikan individu atas aset produksi karena dinilai menciptakan ketimpangan, sementara kapitalisme menjadikan kepemilikan pribadi sebagai pilar utamanya. Dalam sistem sosialis, negara mengambil alih peran penting dalam menyediakan pelayanan publik seperti kesehatan dan pendidikan, sebagaimana dijelaskan oleh (Libra & Fauzan, 2023) yang menunjukkan keberpihakan sosialisme terhadap pemerataan hak dasar.

Namun, sistem ini juga menuai kritik, terutama dalam hal efisiensi dan pembatasan hak individu. (Amri, 2019) menyoroti lemahnya insentif inovasi dalam sistem sosialis akibat hilangnya motivasi individu. Di sisi lain, (Sholahudin, 2001) mengkritik dominasi negara yang bisa mengarah pada otoritarianisme dan melemahkan kebebasan berekspresi serta kemandirian ekonomi. Kajian-kajian tersebut menjadi fondasi penting dalam memahami sosialisme sebagai sistem ekonomi yang menawarkan keadilan dan pemerataan, namun juga mengandung tantangan dalam pelaksanaannya, terutama menyangkut hak dan kebebasan individu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis isi mengenai sistem ekonomi sosialisme, termasuk keunggulan, kelemahan, serta implikasinya terhadap hak individu. Data yang dikaji bersumber dari berbagai literatur ilmiah, seperti buku-buku ekonomi politik, jurnal nasional dan internasional, artikel opini akademik, serta dokumen resmi yang relevan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami sosialisme secara mendalam dari perspektif historis,

ideologis, dan praktik kontemporer, sehingga menghasilkan deskripsi yang menyeluruh mengenai sistem tersebut (Nasrul et al., 2024).

Penelitian kepustakaan bertujuan menggali dan mengkaji literatur yang relevan untuk merumuskan konsep atau menjawab pertanyaan penelitian secara sistematis dan kritis. Sementara itu, pendekatan kualitatif deskriptif bertujuan menginterpretasi fenomena sosial berdasarkan makna yang dimiliki oleh subjek penelitian, dalam hal ini wacana sosialisme dalam konteks ekonomi modern. Analisis dilakukan melalui tahapan identifikasi sumber, kategorisasi tema (kebaikan, kelemahan, dan kritik), dan interpretasi naratif terhadap gagasan serta argumen yang terkandung dalam sumber-sumber ilmiah tersebut (Salim et al., 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Dasar Sosialisme

Untuk memahami sosialisme dengan baik, perlu mengenali definisi dan prinsip-prinsip dasarnya terlebih dahulu. Sosialisme merupakan suatu sistem ekonomi dan ideologi politik yang menekankan kepemilikan bersama atau oleh negara atas alat-alat produksi, serta distribusi hasil produksi yang adil kepada seluruh anggota masyarakat. Tujuan utama sosialisme adalah mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi melalui penghapusan dominasi individu atau kelompok tertentu atas sumber daya ekonomi (Wikandaru & Cahyo, 2016).

Salah satu perbedaan mendasar antara sosialisme dan kapitalisme terletak pada konsep kepemilikan dan distribusi. Dalam sistem kapitalisme, alat produksi dimiliki oleh individu atau perusahaan swasta, di mana keuntungan menjadi motivasi utama. Distribusi pendapatan terjadi berdasarkan kontribusi dan mekanisme pasar. Sebaliknya, sosialisme menolak kepemilikan pribadi atas alat produksi dan lebih menekankan kepemilikan kolektif oleh negara atau komunitas, dengan tujuan distribusi pendapatan yang merata dan berbasis kebutuhan (Ramli, 2005).

Dalam praktiknya, sosialisme muncul dalam berbagai bentuk tergantung pada konteks politik dan historis suatu negara. Sosialisme utopis bersifat teoretis dan idealis, menginginkan masyarakat yang sepenuhnya adil tanpa melalui konflik kelas. Sosialisme demokratik berusaha menggabungkan prinsip keadilan sosial dengan mekanisme demokrasi, sementara sosialisme otoriter cenderung menggunakan kekuasaan negara secara dominan dan terpusat untuk mengatur kehidupan ekonomi dan sosial. Variasi-variasi ini menunjukkan bahwa sosialisme bukanlah sistem tunggal, melainkan spektrum pemikiran dan kebijakan yang berupaya mengatasi ketimpangan ekonomi dengan cara yang berbeda-beda (Pangiuk, 2017).

Selain itu, penerapan sosialisme di dunia nyata sering kali menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Salah satu tantangan utama adalah menciptakan keseimbangan antara kontrol negara dan kebebasan individu. Dalam beberapa situasi, negara-negara yang menerapkan sistem sosialisme otoriter cenderung menggunakan kontrol terpusat yang sangat kuat. Meskipun pendekatan ini dapat menghasilkan efisiensi dalam pengelolaan ekonomi, pada saat yang sama juga berpotensi mengurangi kebebasan pribadi dan menimbulkan ketidakadilan akibat kekuasaan yang tidak terkontrol. Oleh karena itu, sosialisme demokratik, yang lebih menekankan pada partisipasi rakyat dan kebebasan politik, dianggap oleh sebagian orang sebagai solusi yang lebih berkelanjutan (Pramasanti et al., 2015).

Walaupun tantangan-tantangan tersebut ada, tujuan utama sosialisme tetap relevan dalam mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi yang terus berkembang. Di tengah globalisasi yang semakin memperlebar kesenjangan antara negara kaya dan miskin, serta antara individu kaya dan miskin, sosialisme menawarkan alternatif yang lebih adil dengan mengedepankan redistribusi

kekayaan dan penyediaan layanan publik yang lebih merata. Sistem sosialisme yang menekankan keadilan sosial dapat memberikan solusi untuk mengatasi ketidaksetaraan tersebut, dengan memberikan akses yang lebih setara kepada setiap individu terhadap peluang ekonomi dan sosial (Tantangan & Solusi, 2024).

Sebagai sebuah ideologi, sosialisme tetap menjadi bagian penting dalam diskusi ekonomi dan politik masa kini. Meskipun bentuk penerapannya bervariasi, gagasan sosialis yang berfokus pada pemerataan kesejahteraan, penghapusan ketimpangan, dan distribusi sumber daya yang adil terus dipertimbangkan sebagai landasan untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan. Kendati tantangan besar masih ada, sosialisme tetap menghadirkan pandangan alternatif dalam usaha membangun dunia yang lebih baik (Badarussyamsi et al., 2023).

B. Keباikan Sistem Ekonomi Sosialis

Seperti yang telah dibahas dalam konsep dasarnya, sistem ekonomi sosialis dibangun di atas prinsip kepemilikan kolektif terhadap alat-alat produksi dan distribusi kekayaan yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Tujuan utamanya adalah menciptakan tatanan ekonomi yang bebas dari eksploitasi, ketimpangan, dan ketidakpastian yang seringkali melekat pada kapitalisme (Anggraeni, 2024). Dari prinsip-prinsip ini, muncul beberapa keunggulan nyata dalam penerapannya, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pemerataan Distribusi Kekayaan dan Sumber Daya

Sosialisme menghapuskan dominasi individu dalam kepemilikan alat produksi, seperti pabrik, lahan, dan modal besar. Dalam sistem ini, alat-alat produksi dimiliki oleh negara atau komunitas sehingga hasil dari kegiatan ekonomi dapat dialokasikan dengan lebih adil. Berbeda dengan kapitalisme, yang seringkali menumpuk kekayaan di tangan segelintir individu atau korporasi, sosialisme berupaya mencegah akumulasi kekayaan yang tidak seimbang. Alokasi kekayaan nasional dilakukan melalui perencanaan yang berfokus pada kesejahteraan kolektif, bukan hanya pada efisiensi atau profit semata. Distribusi yang merata ini menciptakan kesempatan yang setara bagi seluruh warga negara dalam mengakses sumber daya ekonomi, memperoleh pekerjaan, dan menikmati hasil pembangunan. Hal ini sejalan dengan tujuan utama sosialisme, yaitu penghapusan kesenjangan sosial dan pembentukan masyarakat yang lebih egaliter (Hadi, 2016).

2. Jaminan Sosial dan Pelayanan Publik yang Merata

Salah satu keunggulan mencolok dari sistem sosialis adalah tanggung jawab negara dalam menjamin kebutuhan dasar warganya. Dalam konteks ini, pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi disediakan secara luas oleh negara, terjangkau, bahkan sering kali gratis. Prinsip ini menegaskan bahwa kebutuhan dasar bukanlah komoditas yang diperdagangkan, melainkan hak yang wajib dipenuhi oleh negara terhadap rakyatnya. Dengan adanya jaminan sosial yang kuat, masyarakat tidak perlu khawatir akan akses terhadap layanan penting dalam kehidupan. Sebagai contoh, setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan terlepas dari status ekonomi mereka. Ini berbeda dari sistem kapitalis yang seringkali menyerahkan sektor-sektor vital tersebut kepada mekanisme pasar dan swasta (Fitria & Sitabuana, 2021).

3. Stabilitas Ekonomi dan Perlindungan dari Krisis Pasar

Sistem ekonomi sosialis juga menawarkan stabilitas ekonomi yang lebih baik. Dengan produk dan distribusi yang dikelola secara terpusat oleh negara melalui perencanaan jangka panjang, fluktuasi ekstrem yang sering terjadi dalam ekonomi pasar bebas dapat diminimalkan. Negara berhak

menentukan prioritas produksi berdasarkan kebutuhan rakyat, bukan hanya berdasarkan permintaan pasar atau potensi keuntungan. Dalam sistem kapitalis, sektor-sektor seperti properti atau saham dapat mengalami spekulasi yang besar, menyebabkan gelembung ekonomi. Namun, dalam sosialisme, karena sektor-sektor tersebut tidak tergantung pada spekulasi pasar, risiko krisis finansial akibat investasi berlebihan atau manipulasi pasar dapat diperkecil. Selain itu, fokus sosialisme pada pemenuhan kebutuhan dasar (seperti makanan, perumahan, pendidikan, dan kesehatan) menjadikannya relatif kuat terhadap guncangan ekonomi global. Negara dapat mengontrol harga, menjamin lapangan kerja, dan mengendalikan inflasi pada tingkat yang stabil.

4. Pengurangan Pengangguran dan Penciptaan Lapangan Kerja

Dalam sistem sosialisme, negara memainkan peran penting dalam menciptakan lapangan kerja bagi warganya. Melalui perencanaan ekonomi yang terpusat, pemerintah dapat mengatur tingkat produksi dan distribusi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga mengurangi angka pengangguran. Di sisi lain, dalam sosialisme, ketenagakerjaan tidak sekadar dilihat sebagai sarana untuk meraih keuntungan, melainkan juga sebagai hak dasar setiap individu untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan bermartabat. Negara berupaya memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses terhadap pekerjaan yang mampu memberikan penghidupan yang decent. Hal ini berbeda dengan kapitalisme, di mana sektor swasta sering kali lebih mengutamakan efisiensi dan profitabilitas daripada penciptaan lapangan kerja yang merata. Dengan demikian, sosialisme menawarkan solusi terhadap masalah pengangguran struktural yang sering muncul akibat ketimpangan ekonomi yang diakibatkan oleh pasar bebas (Kambali, 2016).

5. Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat

Dalam kerangka sosialisme, kebijakan ekonomi difokuskan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Mengingat negara bertanggung jawab atas kesejahteraan warganya, sistem ini mendorong penyediaan berbagai fasilitas dan layanan yang dapat meningkatkan standar hidup, seperti pendidikan berkualitas, akses mudah terhadap perawatan kesehatan, serta perumahan yang layak. Sosialisme menekankan bahwa setiap individu berhak mendapatkan akses yang setara terhadap layanan-layanan dasar ini, tanpa memandang status ekonomi. Dengan mengurangi ketimpangan dalam akses terhadap sumber daya dan peluang, sosialisme bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera, di mana kualitas hidup tidak ditentukan oleh kekayaan individu, namun oleh pemenuhan kebutuhan dasar yang diakomodasi oleh negara (Nasrul et al., 2024).

6. Pencegahan Eksploitasi Sumber Daya Alam

Salah satu keuntungan utama dari sistem sosialisme adalah pengelolaan sumber daya alam yang lebih berkelanjutan. Dalam konteks sosialisme, negara mengendalikan sumber daya alam yang ada di wilayahnya, sehingga pengelolaannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan rakyat dan bukan hanya untuk kepentingan individu. Melalui pendekatan yang lebih terencana dan terkendali, sosialisme berupaya mencegah eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam yang dapat merusak lingkungan dan membawa dampak buruk dalam jangka panjang. Negara dapat mengatur produksi dan konsumsi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, serta memastikan bahwa hasilnya bermanfaat bagi seluruh masyarakat, bukan hanya untuk kelompok tertentu (Sihombing & Banke, 2023).

C. Kelemahan Sistem Ekonomi Sosialis

Sistem ekonomi sosialis dibangun dengan tujuan pemerataan, tanggung jawab kolektif, dan keadilan sosial. Meskipun dalam teori sistem ini menjanjikan distribusi yang adil dan perlindungan dari ketimpangan, dalam praktiknya, muncul berbagai kelemahan mendasar (Amri, 2019). Beberapa

kelemahan ini justru merupakan konsekuensi dari prinsip-prinsip dasar sosialisme yang selama ini dianggap sebagai kelebihan.

1. Kurangnya Insentif untuk Inovasi dan Produktivitas Individu

Salah satu efek dari penghapusan kepemilikan pribadi atas alat produksi dan hasil usaha adalah berkurangnya motivasi individu untuk bekerja lebih keras, berinovasi, atau menciptakan hal baru. Dalam sistem sosialis, keuntungan dari usaha tidak diperoleh individu, melainkan dikembalikan kepada negara atau masyarakat. Hal ini mengurangi dorongan untuk mengambil risiko atau melakukan terobosan ekonomi (Sholahudin, 2001).

Berbeda dengan sistem kapitalis yang memberikan insentif langsung berupa keuntungan pribadi kepada inovator dan pengusaha, dalam sosialisme, semua orang diperlakukan secara relatif sama, terlepas dari besar atau kecilnya kontribusi mereka. Akibatnya, semangat kompetisi dan produktivitas cenderung menurun, yang pada jangka panjang dapat menghambat kemajuan teknologi, pertumbuhan ekonomi, serta efisiensi kerja (Anggraeni, 2024).

2. Ketidakefisienan Birokrasi dan Sistem Terpusat

Salah satu kelebihan sosialisme adalah perencanaan ekonomi terpusat yang bertujuan untuk menjamin stabilitas dan pemerataan. Namun, dalam praktiknya, sistem ini seringkali menghadapi kendala birokrasi yang rumit. Perencanaan ekonomi yang bersifat terpusat membutuhkan data yang sangat akurat serta kemampuan teknokratik yang tinggi agar keputusan yang diambil sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Santoso, 2011).

Sayangnya, birokrasi negara sering kali tidak cukup fleksibel untuk merespons perubahan yang cepat dalam masyarakat dan pasar. Hal ini menyebabkan proses produksi dan distribusi menjadi lambat, tidak efisien, dan kurang responsif. Misalokasi sumber daya, tumpang tindih kebijakan, serta kelangkaan barang kerap terjadi akibat keterlambatan atau kesalahan dalam perencanaan (Mori, 2017).

3. Potensi Korupsi dan Penyalahgunaan Kekuasaan oleh Negara

Sistem sosialis memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada negara, mencakup kepemilikan aset ekonomi, pengelolaan distribusi, dan penentuan arah pembangunan. Dalam keadaan di mana kontrol terhadap kekuasaan negara lemah, akan terbuka peluang besar bagi munculnya korupsi, nepotisme, dan penyalahgunaan wewenang (Ardila et al., 2023).

Tanpa mekanisme persaingan pasar yang sehat dan transparan, pejabat negara cenderung menguasai sumber daya secara mutlak. Hal ini dapat menciptakan elit birokrasi yang menikmati keistimewaan tertentu, yang bertentangan dengan semangat pemerataan itu sendiri. Beberapa contoh nyata dapat dilihat di negara-negara sosialis otoriter, di mana rakyat justru mengalami penindasan, kelaparan, dan kemiskinan akibat penyalahgunaan sistem oleh elite penguasa demi kepentingan pribadi (Osipian, 2014).

Meski demikian, terdapat contoh di tingkat lokal yang menunjukkan bahwa kepemilikan kolektif dapat dikelola dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi. Sebagaimana terlihat dalam tata kelola BUMDes Sumber Jaya Abadi di Desa Sumberagung, Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan, penerapan Good Corporate Governance mampu meminimalisir potensi penyalahgunaan wewenang, sekaligus meningkatkan efisiensi dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga milik bersama tersebut (Hamid & Maulindra, 2019).

4. Kurangnya Fleksibilitas dalam Menghadapi Perubahan Global

Di tengah dinamika global yang terus bergerak cepat, terutama dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi, sistem ekonomi sosialis sering kali menghadapi tantangan dalam beradaptasi dengan cepat. Dengan perencanaan ekonomi jangka panjang yang kaku dan dominasi pemerintah

dalam pengambilan keputusan, proses untuk menanggapi tantangan baru menjadi terhambat. Negara sosialis cenderung memerlukan waktu lebih lama untuk merespons perubahan pasar global, seperti krisis energi, transisi menuju teknologi digital, atau dampak perubahan iklim (Silitonga, 2020).

Ketika negara tidak mampu menunjukkan fleksibilitas dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang responsif dan tepat waktu, keterlambatan dalam menangani tantangan ekonomi global yang terus berkembang pun tak terhindarkan. Situasi ini dapat berdampak pada penurunan daya saing di kancah internasional dan berkurangnya efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya. Dalam jangka panjang, kondisi ini bisa berujung pada stagnasi ekonomi yang sulit diatasi.

5. Menurunnya Kualitas Pelayanan Publik

Meskipun sistem sosialis berusaha menjamin pelayanan publik yang merata, dalam praktiknya, kualitas layanan tersebut sering kali menurun karena minimnya kompetisi. Tanpa adanya tekanan dari pasar, lembaga layanan publik yang dioperasikan oleh negara cenderung kurang memiliki insentif untuk meningkatkan mutu pelayanannya. Hal ini berdampak pada stagnasi kualitas layanan dalam sektor kesehatan, pendidikan, dan transportasi publik, yang seharusnya terus berkembang (Muswizar Antoni, SAP., 1945).

Selain itu, ketika permintaan masyarakat melebihi kapasitas layanan yang tersedia, perkara seperti antrian panjang, pelayanan yang lambat, dan kualitas infrastruktur yang buruk mulai muncul. Kurangnya mekanisme evaluasi yang berbasis pada kepuasan pengguna juga mengakibatkan rendahnya akuntabilitas. Akibatnya, meskipun layanan publik tersebut dapat diakses oleh semua orang, masyarakat sering kali tidak mendapatkan kualitas pelayanan yang memadai dan layak.

6. Dominasi Negara atas Kehidupan Individu

Salah satu kekhawatiran utama dalam penerapan sosialisme secara total adalah dominasi yang berlebihan dari negara dalam kehidupan masyarakat. Dalam sistem ini, hampir seluruh aspek kehidupan ekonomi dan sosial berada di bawah kontrol pemerintah, mulai dari pekerjaan hingga pendidikan, serta produksi dan konsumsi. Ketika negara terlalu dominan, ruang kebebasan individu menjadi sangat terbatas.

Pengawasan yang ketat, regulasi yang kaku, dan pembatasan terhadap kebebasan berekspresi serta berusaha menjadi tantangan serius dalam upaya mempertahankan nilai-nilai demokrasi. Masyarakat yang hidup dalam sistem semacam ini sering kali merasa tertekan dan tidak memiliki kesempatan untuk berkontribusi secara mandiri. Oleh karena itu, tanpa adanya sistem pengawasan dan akuntabilitas yang efektif, dominasi negara dalam kerangka sosialisme dapat berujung pada pelanggaran hak asasi manusia dan pembatasan terhadap hak-hak individu.

Dengan demikian, meskipun sistem sosialis menjanjikan keadilan dan stabilitas, ia juga menyimpan potensi besar untuk menciptakan stagnasi, inefisiensi, dan dominasi negara yang berlebihan atas individu. Kelemahan-kelemahan ini secara langsung berkaitan dan bahkan bisa dikatakan merupakan bayangan gelap dari kelebihanannya sendiri. Konsep pemerataan tanpa mempertimbangkan aspek motivasi individual, serta dominasi negara tanpa kontrol yang memadai, dapat menggerus nilai-nilai kebebasan dan kemanusiaan yang seharusnya juga menjadi bagian dari keadilan sosial (Keislaman et al., 2018).

D. Penolakan Terhadap Hak Individu

Salah satu kritik yang paling mendalam terhadap sistem ekonomi sosialis adalah posisinya terhadap hak individu, terutama dalam hal kepemilikan, kebebasan ekonomi, dan kemandirian dalam pengambilan keputusan. Kritik ini tidak hanya muncul dari kalangan liberal atau kapitalis, tetapi juga

dari sejumlah tokoh dan negara yang pernah menerapkan sistem sosialis secara ekstrim, yang kemudian mengalami krisis sosial dan politik. Dalam konteks ini, berbagai kelemahan yang telah dibahas sebelumnya seperti minimnya insentif individu, inefisiensi birokrasi, dan dominasi negara semuanya berakar pada penyangkalan terhadap hak-hak ekonomi individu (Amri, 2019). Berikut adalah penjabaran lebih lanjut mengenai hal ini:

1. Pandangan Sosialisme terhadap Kepemilikan Pribadi atas Alat Produksi

Dalam paham sosialis, khususnya dalam bentuk yang ortodoks atau otoriter, kepemilikan pribadi terhadap alat produksi dianggap sebagai penyebab ketimpangan sosial dan eksploitasi kelas. Oleh karena itu, sosialisme berupaya menghapuskan kepemilikan pribadi atas sumber daya produktif, seperti pabrik, lahan pertanian, infrastruktur produksi, dan modal besar. Aset-aset tersebut dialihkan ke milik negara atau kolektif, dengan harapan bahwa pengelolaan bersama akan membawa keadilan bagi semua (Ramli, 2005).

Namun, dalam praktiknya, penghapusan kepemilikan pribadi ini mengurangi kebebasan individu untuk mengelola, mengembangkan, dan menikmati hasil dari usahanya sendiri. Contohnya, seorang pengusaha kecil yang ingin mengembangkan bisnisnya mungkin terhalang oleh kebijakan kolektif atau karena negara mengatur seluruh sektor ekonomi. Dalam jangka panjang, hal ini menciptakan ketergantungan pada negara dan meredam semangat berwirausaha (Pangiuk, 2017).

2. Pembatasan Kebebasan Ekonomi Individu

Kebebasan ekonomi meliputi hak individu untuk menentukan cara memperoleh pendapatan, menggunakan kekayaan yang dimiliki, serta memanfaatkan hasil kerja atau usahanya. Dalam sistem sosialis yang terpusat, semua keputusan ekonomi utama berada di bawah kendali negara, mulai dari penetapan harga, alokasi sumber daya, hingga distribusi produk dan layanan (Amri, 2019).

Pembatasan ini mengakibatkan dampak langsung terhadap individu, seperti:

- a. Pilihan konsumsi menjadi terbatas karena produksi disesuaikan dengan rencana pusat, bukan berdasarkan permintaan pasar.
- b. Kemampuan untuk mengembangkan usaha mandiri atau inovatif menjadi sangat minim, mengingat adanya prosedur birokrasi dan sistem lisensi yang ketat.
- c. Mobilitas ekonomi menjadi rendah, karena individu tidak bebas untuk berpindah sektor usaha, memanfaatkan peluang pasar, atau bersaing demi keuntungan.

Ketika individu tidak dapat mengambil keputusan mengenai bagaimana menggunakan waktu, tenaga, dan hasil kerja sesuai dengan keinginan serta kemampuannya, maka kebebasan fundamental dalam aspek ekonomi telah dilanggar.

3. Implikasi terhadap Kebebasan Memilih Pekerjaan, Berusaha, dan Berinovasi

Dalam sistem ekonomi yang bebas, individu memiliki kebebasan untuk memilih bidang pekerjaan sesuai dengan minatnya, mendirikan usaha ketika melihat peluang, dan berinovasi untuk menciptakan nilai tambah. Inovasi menjadi pendorong kemajuan teknologi, efisiensi, dan kesejahteraan ekonomi masyarakat (Bennett & Nikolaev, 2019).

Namun, dalam sistem sosialis yang kaku dan sentralistik:

- a. Pekerjaan sering kali ditentukan oleh negara, bukan berdasarkan pilihan pribadi. Penempatan tenaga kerja bisa didasarkan pada kebutuhan negara, bukan pada kehendak atau keahlian individu.
- b. Kegiatan berwirausaha sering kali tidak memiliki ruang atau bahkan dianggap ilegal, karena dianggap bertentangan dengan prinsip kolektif dan berpotensi menimbulkan ketimpangan.

- c. Inovasi berkembang dengan lambat akibat tidak adanya insentif ekonomi bagi para inovator, dan ide-ide baru kerap kali harus melalui proses persetujuan birokratis yang panjang.

Secara tidak langsung, situasi ini menghalangi potensi individu dan mengurangi martabat manusia sebagai subjek yang bebas dan kreatif. Dalam jangka panjang, masyarakat cenderung menjadi pasif, ketergantungan, dan kehilangan motivasi untuk berusaha lebih karena merasa tidak ada manfaat pribadi yang dapat diperoleh dari kerja keras atau ide-ide brilian.

E. Isu-Isu Terkini Terkait Penolakan terhadap Hak Individu

Dalam beberapa dekade terakhir, berbagai peristiwa di dalam dan luar negeri menunjukkan kecenderungan negara untuk melakukan intervensi kuat terhadap kebebasan ekonomi individu. Meskipun tidak semua negara tersebut secara eksplisit menerapkan sistem ekonomi sosialis, karakteristik kebijakan yang mereka ambil seringkali mencerminkan prinsip-prinsip sosialisme otoriter, khususnya dalam hal pembatasan hak milik pribadi, kebebasan berinovasi, dan pengambilan keputusan ekonomi secara mandiri (Salsabilla et al., 2023).

Di tingkat global, salah satu contoh mencolok adalah langkah pemerintah Tiongkok terhadap raksasa teknologi seperti Alibaba dan Tencent pada tahun 2020 hingga 2022. Pemerintah secara tiba-tiba membatalkan penawaran saham perdana (IPO) Ant Group serta memperketat regulasi terhadap platform digital besar. Tujuannya adalah untuk mengendalikan arus data dan sistem keuangan digital agar tetap berada di bawah kontrol negara. Meskipun didasari alasan stabilitas nasional, langkah ini membatasi ruang inovasi dan hak individu atau kelompok swasta untuk mengembangkan sektor strategis. Kasus ini mencerminkan bagaimana sistem ekonomi yang cenderung sentralistik dapat menghambat potensi individu dan meredam semangat kewirausahaan (Salsabilla et al., 2023).

Contoh lain datang dari Venezuela, di mana sejak 2014 hingga kini negara tersebut mengalami krisis ekonomi akibat nasionalisasi sektor minyak dan pertanian. Pemerintah mengendalikan penuh distribusi pangan dan energi, namun hal ini justru menimbulkan kelangkaan barang, inflasi ekstrem, dan gelombang migrasi besar-besaran. Ketika kontrol negara terlalu dominan, tanpa disertai transparansi dan efisiensi, hak individu untuk menjalankan usaha dan memperoleh hasil kerja sendiri menjadi sangat terbatas (Vuong, 2023).

Di India, pada tahun 2020–2021 terjadi gelombang protes besar-besaran dari petani terhadap reformasi undang-undang pertanian. Para petani menilai bahwa kebijakan pemerintah justru akan menyerahkan kendali pasar hasil pertanian kepada korporasi besar dan menghilangkan peran serta kendali mereka sebagai produsen utama. Isu ini menggambarkan konflik antara mekanisme sentral (baik negara maupun swasta besar) dengan hak-hak ekonomi individu, khususnya petani kecil yang bergantung pada fleksibilitas pasar lokal (Narula & Laws, 2021).

Sementara itu, di Indonesia, beberapa isu domestik menunjukkan pola serupa. Pada tahun 2023, pemerintah mengeluarkan Permendag No. 31 yang melarang aktivitas perdagangan langsung di platform social commerce seperti TikTok Shop. Kebijakan ini berdampak langsung pada jutaan UMKM dan individu yang menggunakan platform tersebut untuk mencari nafkah. Dengan dalih perlindungan terhadap pasar tradisional, kebijakan ini justru membatasi ruang ekonomi individu di era digital dan mengurangi kesempatan berinovasi dalam model bisnis baru (Rena et al., 2023).

Proyek Food Estate yang mulai digalakkan sejak 2020 juga menimbulkan kekhawatiran serupa. Dalam proyek ini, lahan pertanian skala besar dikelola oleh negara dengan mengalihkan tanah masyarakat lokal, termasuk tanah adat. Banyak pihak menilai bahwa proyek ini meminggirkan hak milik komunitas dan petani lokal serta mengabaikan prinsip keberlanjutan sosial dan lingkungan.

Secara esensial, ini adalah bentuk pengambilalihan alat produksi oleh negara atas nama efisiensi nasional, yang sejalan dengan praktik-praktik sosialisme terpusat (Saebani & Triadi, 2024).

Selain itu, penerapan pajak digital pada tahun 2022–2024 terhadap konten kreator, produk digital, dan e-commerce juga menjadi sorotan. Meskipun bertujuan untuk menciptakan kesetaraan fiskal, kebijakan ini dianggap membatasi ruang tumbuh ekonomi individu di sektor digital yang selama ini menjadi penopang ekonomi mandiri, terutama bagi generasi muda (Affardi, 2024).

Keseluruhan isu-isu ini menunjukkan bahwa di era modern, bentuk penolakan terhadap hak individu dalam aktivitas ekonomi tidak selalu datang dari sistem sosialis formal, melainkan bisa juga melalui regulasi negara yang memiliki karakter sentralistik. Pola ini sejalan dengan kritik terhadap sosialisme klasik, di mana negara terlalu dominan dalam menentukan nasib ekonomi rakyat, sehingga ruang untuk inisiatif, kreativitas, dan kepemilikan pribadi menjadi sangat terbatas.

KESIMPULAN

Sistem ekonomi sosialis menekankan pada pengelolaan ekonomi oleh negara atau masyarakat dengan tujuan untuk mencapai pemerataan kesejahteraan dan mengurangi ketimpangan sosial. Dalam sistem ini, sektor-sektor ekonomi strategis, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, biasanya dikelola oleh negara untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar seluruh lapisan masyarakat dapat dipenuhi tanpa ada perbedaan signifikan. Meskipun tujuan utamanya adalah menciptakan masyarakat yang lebih adil, implementasi sistem ini seringkali menghadapi tantangan dalam hal efisiensi dan daya saing. Salah satu masalah utama yang muncul adalah birokrasi yang cenderung rumit, yang dapat menghambat inovasi dan responsivitas terhadap perubahan kondisi ekonomi.

Namun, meskipun sistem sosialis menghadapi sejumlah kekurangan, relevansinya tetap kuat dalam mengatasi masalah ketidaksetaraan sosial yang semakin meningkat. Ketimpangan dalam pendapatan dan akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan menjadi isu yang mendesak, terutama dalam konteks global saat ini. Masyarakat yang terpinggirkan cenderung menerima dampak buruk dari ekonomi pasar bebas, yang seringkali lebih memprioritaskan keuntungan daripada kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, sosialisme menawarkan solusi untuk menciptakan pemerataan yang lebih adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

Penerapan sistem ekonomi sosialis juga memberikan gambaran penting mengenai peran negara dalam mengatur ekonomi untuk mencapai kesejahteraan sosial yang lebih merata. Meskipun ada kelemahan dalam hal efisiensi dan pengelolaan sumber daya, prinsip-prinsip dasar sosialisme tetap memiliki potensi untuk membangun masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan. Tentu saja, keberhasilan sistem sosialisme tergantung pada bagaimana elemen-elemen tersebut diadaptasi dan diintegrasikan dalam konteks ekonomi dan sosial yang terus berkembang.

SARAN

Dalam rangka mengoptimalkan penerapan sistem ekonomi sosialis, penting untuk melakukan reformasi dalam hal manajemen birokrasi dan pengelolaan sumber daya. Untuk memastikan bahwa sosialisme dapat berjalan efektif, negara perlu mengurangi hambatan administratif yang dapat memperlambat proses pengambilan keputusan dan distribusi kekayaan. Pengurangan birokrasi yang berlebihan akan memberikan lebih banyak ruang bagi efisiensi dan inovasi, yang sangat diperlukan dalam era modern. Negara harus memastikan bahwa peran regulasi dan kontrol yang dipegangnya tidak menghambat perkembangan sektor-sektor yang dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, seperti teknologi dan industri kreatif.

Selain itu, sistem ekonomi sosialis perlu lebih mengintegrasikan prinsip-prinsip pasar dalam kerangka sosialisme. Adopsi elemen-elemen ekonomi pasar dapat mendorong daya saing dan mempercepat inovasi, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Negara perlu memberikan ruang bagi sektor swasta untuk berkembang, tanpa mengorbankan tujuan utama sosialisme untuk memastikan distribusi kekayaan yang lebih merata. Ini dapat dicapai melalui kebijakan yang mendukung kolaborasi antara sektor publik dan swasta dalam menciptakan peluang ekonomi yang adil bagi semua pihak.

Terakhir, sistem sosialisme harus beradaptasi dengan tantangan globalisasi yang semakin kompleks. Ekonomi dunia yang saling terhubung menuntut adanya kerjasama internasional dalam menciptakan kebijakan ekonomi yang berkelanjutan dan adil. Negara-negara yang mengadopsi sistem ekonomi sosialis perlu memperkuat hubungan dengan negara lain untuk memperluas pasar, mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu, serta memitigasi dampak dari krisis ekonomi global. Untuk itu, fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi dengan dinamika ekonomi global menjadi kunci untuk keberhasilan penerapan sosialisme yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adler, P. S. (2022). *Capitalism, Socialism, and the Climate Crisis*.
<https://doi.org/10.1177/26317877221084713>
- Affardi, C. W. P. (2024). DAMPAK DAN TANTANGAN PENERAPAN PAJAK DIGITAL DI INDONESIA : STUDI KASUS PT. SII dan PT. T. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 8(2), 875–901. <https://doi.org/10.31955/mea.v8i2.4093>
- Amri, H. (2019). Kelemahan Sistem Ekonomi Kapitalisme Dan Sosialisme Menurut Muhammad Sharif Chaudhry Dalam Karyanya Fundamental of Islamic Economic System. *Kelemahan Sistem Ekonomi Kapitalisme Dan Sosialisme Menurut Muhammad Sharif Chaudhry Dalam Karyanya Fundamental of Islamic Economic System.*, 2, 1–16.
<https://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/esha/article/download/93/82>
- Anggraeni, E. sulistya. (2024). Tinjauan Perbedaan Sistem Ekonomi : Ekonomi Kapitalis, Ekonomi Sosialis, dan Ekonomi Islam. *Economic and Business Management International Journal*, 6(2), 63–76.
- Ardila, I., Fauziah, D. A., Putri, K. R., Firnanda, A., Hardiansyah, M. A., Sosiologi, P., Sultan, U., & Tirtayasa, A. (2023). *Penyalahgunaan Kekuasaan dalam Tindakan Korupsi Bantuan Sosial oleh Pejabat Publik Perspektif Max Weber*. 13, 222–234.
- Badarussyamsi, B., Begin, D. A., & Kaylani, K. (2023). Pemikiran Sosialisme Islam H.O.S Tjokroaminoto untuk Penguatan Visi Demokrasi Indonesia. *Journal of Comprehensive Islamic Studies*, 2(1), 49–68. <https://doi.org/10.56436/jocis.v2i1.35>
- Bennett, D. L., & Nikolaev, B. (2019). *Chapter 4 Economic Freedom, Public Policy, and Entrepreneurship*. 199–224.
- Dr. Aang Ridwan, M. A. (2019). *SOSIOLOGI INDUSTRI Transformasi Menuju Masyarakat Post-Indusri*. 119–120.
- Fitria, S., & Sitabuana, T. H. (2021). Penerapan Konsep Welfare State Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Indonesia. *Jurnal Hukum Adigama*, 4(2), 51–72.
- Hadi, A. C. (2016). Sistem Kewarisan Islam Dan Pemerataan Distribusi Kekayaan. *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 15(2), 295–312.
<https://doi.org/10.15408/kordinat.v15i2.6335>

- Hamid, A. M., & Maulindra, M. B. S. A. (2019). Penerapan Good Corporate Governance Dalam Tata Kelola BUMDes Sumber Jaya. *ADILLA : Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 3–4.
- Kambali, M. (2016). Analisis Peran Negara Di Bidang Ekonomi Dalam Prespektif Sistem Kapitalisme, Sosialisme, Dan Ekonomi Islam. *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 1(1), 16–35. <https://doi.org/10.30736/jesa.v1i1.3>
- Keislaman, J. I., Tinggi, S., Islam, A., & Pekanbaru, A. (2018). *Abstract The paradigm of the capitalist and socialist economic system suggests that the production and consumption and distribution of wealth in principle have been established in accordance with applicable economic laws in the economic practice of societ.* 17(1), 97–129.
- Libra, R., & Fauzan, M. (2023). Penerapan Konsep Welfare State Dalam Memprioritaskan Pelayanan dibidang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Riau. *Jurnal Esensi Hukum*, 5(1), 39–49. <https://journal.upnvj.ac.id/index.php/esensihukum/index>
- Mori, G. T. (2017). Examining Hindrance of Bureaucracy on Management Innovation for Organizations. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 7(4), 601–607. <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v7-i4/2835>
- Muswizar Antoni, SAP., M. (1945). *MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK Oleh:*
- Narula, S., & Laws, F. (2021). Confronting State Violence : Lessons From India ' S Farmer Protests. *Columbi Human Rights Law Review*, December, 92–169. https://hrlr.law.columbia.edu/files/2022/12/Narula_Finalized-12.08.22.pdf
- Nasrul, M., Setiawan, A., & Hamin, D. I. (2024). *Perbandingan Sistem Ekonomi Sosialisme , Kapitalisme , dan Ekonomi Syariah : Sebuah Analisis Kritis terhadap Prinsip , Implementasi , dan Dampak Sosial.* 7(2), 1011–1024.
- Osipian, A. (2014). *Corrupt Organizational Hierarchies in the Former Soviet Bloc Corrupt Organizational Hierarchies in the Former Soviet Bloc.* June 2007. <https://doi.org/10.1007/s11300-010-0174-y>
- Pangiuk, A. (2017). Kepemilikan Ekonomi Sosialis dan Kapitalis (Konsep Tauhid Dalam Sistem Islam). *TAZKIYA Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, 1–19.
- Pramasanti, R., Utama, T. C., & Setiyono, B. (2015). *PEMIKIRAN POLITIK SUTAN SJAHRIR TENTANG SOSIALISME SEBUAH ANALISIS PSIKOLOGI POLITIK SUTAN SJAHRIR POLITICAL THOUGHT ABOUT SOCIALISM AS A PSYCHOLOGICAL POLITIC ANALYSIS Restuning.* 6.
- Ramli, T. A. (2005). Kepemilikan Pribadi Perspektif Islam, Kapitalis, Dan Sosialis. *Mimbar*, 21(1), 1–13.
- Rena, Humairoh, I. D., & Rosmiawati, M. (2023). Problematika Normatif dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 Terkait Larangan Social-Commerce pada Tiktok Shop. *Jurnal Crepido*, 05(November), 184–195.
- Saebani, A. R., & Triadi, I. (2024). Analisis Terhadap Proyek Food Estate dalam Penggunaan Lahan Hutan dan Ketahanan Pangan Ditinjau dari Perspektif Hukum Lingkungan. *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 2(3), 65–74. <https://journal.widyakarya.ac.id/index.php/Deposisi-widyakarya/article/view/3674>
- Salim, A. S., Purnamasari, A., & Nugraha, W. (2023). Pemikiran Ekonomi Taqiyuddin an-Nabhani Tentang Kepemilikan Menurut Ekonomi Islam, Kapitalis Dan Sosialis. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 8(2), 337–346. <https://doi.org/10.36908/esha.v8i2.627>

- Salsabilla, S., Assakhawi, A. Z., Fathullah, M. A., & Rahmawati, N. (2023). Analisis Gaya Kepemimpinan Otoriter Pemerintah Serta Kaitannya dengan Teori Demokrasi. *JPW (Jurnal Politik Walisongo)*, 5(2), 149–162. <https://doi.org/10.21580/jpw.v5i2.18635>
- Santoso, F. S. (2011). Ekonomi Sosialis. *Jurnal Muqtasid*, 2(2), 193–207.
- Sholahudin, M. (2001). *82081-ID-kritik-terhadap-sistem-ekonomisosialis-d* (Vol. 2, Issue 2, pp. 193–209).
- Sihombing, A. T. M., & Banke, R. (2023). Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Simantek*, 7(1), 7–15.
- Silitonga, T. B. (2020). Tantangan globalisasi, peran negara, dan implikasinya terhadap aktualisasi nilai-nilai ideologi negara. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 17(1), 15–28. <https://doi.org/10.21831/jc.v17i1.29271>
- Tantangan, G., & Solusi, D. A. N. (2024). *TRANSFORMASI KESENJANGAN SOSIAL DAN EKONOMI DI ERA INDONESIA*. 11, 11–12.
- Vuong, J. S. (2023). *The Gradual Collapse of the Venezuelan Petrostate and Its Regional Consequences*. 5–30.
- Wikandaru, R., & Cahyo, B. (2016). Landasan Ontologis Sosialisme. *Jurnal Filsafat*, 26(1), 112. <https://doi.org/10.22146/jf.12627>